

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjuangan perempuan untuk mencapai hak-hak mereka sebagai manusia terus berlanjut, mengingat adanya berbagai perubahan dan kemajuan dalam perkembangan peradaban yang sangat cepat. Banyaknya ketimpangan yang dirasakan perempuan dalam hal kesetaraan gender dengan laki-laki, tentu tidak akan ada habisnya jika disebutkan. Isu ketidaksetaraan menandakan adanya pihak dominan dan pihak yang didominasi, dalam status quo saat ini, laki-laki adalah **aktor dominan** dan Perempuan adalah aktor yang didominasi. Sistem budaya patriarki menciptakan dasar bagi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebagai hasilnya, perempuan sering hanya dianggap sebagai kelompok yang harus tunduk, dan kontribusi serta usaha yang dilakukan oleh perempuan sering diabaikan atau kurang dihargai.¹

Pengaruh budaya patriarki telah meresap dan mendominasi kehidupan masyarakat, bahkan di negara seperti Indonesia. Sentimen dominasi laki-laki, terutama di wilayah pedesaan, sangat mencolok, terutama dalam lingkup keluarga.²

¹ Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). *Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia*. 05.

² Rahmi, A. (2022). *The Problems of Women's Participation in Political Parties*. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs>

. Menjadi budaya yang tumbuh subur dalam masyarakat, patriarki berhasil membentuk perubahan tingkah laku, status, dan peran gender dalam masyarakat yang menciptakan strata tingkatan dalam gender.

Dalam sebuah wawancara kepada sejumlah perempuan, Aspinall menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas di masyarakat Indonesia merupakan hambatan yang signifikan. Nilai-nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh yang cukup besar. Sikap-sikap tersebut, yang dimulai dari ranah personal, menjadi penghambat perjuangan kesetaraan gender. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan Aspinall, hampir 97% responden setuju bahwa yang menjadi kepala keluarga harus laki-laki dan perempuan harus menghidupinya, sementara 93,6% berpendapat bahwa perempuan harus meminta izin kepada suaminya untuk bekerja. Faktanya, 74,4% berpendapat bahwa suami harus menjadi pencari nafkah finansial keluarga, dan hanya 23,3% yang mendukung gagasan kesetaraan tanggung jawab keuangan antara suami dan istri³.

Perspektif ini tidak hanya terbatas pada ranah personal namun juga muncul dalam ranah politik. Sebanyak 62% responden dalam penelitian yang dilakukan Aspinall juga setuju bahwa laki-laki lebih berpeluang menjadi pemimpin politik, sementara hanya 19,3% yang tidak setuju. Selain itu, 78,2% responden percaya

³ Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Journal of Current Southeast Asian Affairs Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? In *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 40, Issue 1). <https://doi.org/10.11177/1868103421989720>

bahwa laki-laki harus memimpin asyarakat dan perempuan harus mendukung mereka, dibandingkan dengan hanya 17,6% yang tidak setuju. Meskipun terdapat pandangan yang lebih progresif dari perempuan yang disurvei mengenai kepemimpinan dan otonomi, perbedaannya tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan nilai-nilai patriarki yang masih mempengaruhi berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk ranah politik⁴ .

Dalam ranah politik, patriarki berpengaruh luas pada sistem politik Indonesia. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam arena politik di negara ini juga dipengaruhi oleh budaya dan pandangan patriarkal yang meyakini bahwa politik adalah domain yang lebih sesuai untuk laki-laki. Selain itu, banyak perempuan yang kurang tertarik dalam dunia politik sebagai dampak dari pemikiran tersebut.. Budaya patriarki dan moralitas politik sangat disimbolkan dengan maskulinitas. Pria mendominasi panggung politik, merumuskan peraturan politik, dan menetapkan kriteria penilaian. Selain itu, kehidupan politik diatur berdasarkan norma dan nilai-nilai yang bersifat maskulin. Politik didasarkan pada gagasan menang-kalah atau konfrontasi-kompetisi. Oleh karena itu, perempuan independen dalam dunia politik tidak mudah diterima. Ambisi politik perempuan dianggap sebagai perilaku yang tidak feminin, sehingga perempuan lebih sulit sukses di dunia

⁴ Ibid

politik dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak terbiasa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik⁵.

Dominasi patriarki yang mendalam membuat perempuan sering kali berada dalam posisi yang terpinggirkan dan subordinat dalam lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh ideologi patriarkal yang menganggap wilayah dominasi perempuan adalah di area-area yang memandang mereka sebagai figur yang lemah⁶. Dalam perkembangannya, budaya patriarki tidak hanya berhasil tumbuh dan dijalani masyarakat dunia secara global, tetapi juga mengakar pada lapisan terdalam daerah-daerah tradisional skala kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan segudang keberagaman kebudayaan, tidak luput dari dominasi budaya patriarki. Perbedaan daerah ini juga berpengaruh besar pada proses memaknai dan pengaruh suatu hal yang masuk dalam lingkup wilayah tersebut, termasuk pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat di wilayah tertentu.

Meskipun budaya patriarki mendominasi hampir seluruh daerah di dunia, termasuk di Indonesia, ada satu daerah yang menganut budaya matrilineal yang berbeda. Masyarakat Minangkabau adalah contoh dari budaya matrilineal ini, di mana sistem kekerabatan mengikuti garis ibu, menentukan keturunan, struktur

⁵ Mukarom, Z. (2022). *Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament*. 23(1). <https://vc.bridgew.edu/jiws>

⁶ Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). *Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia*. 05.

suku, dan praktik perkawinan⁷. Meski demikian, hasil pemilu DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total 65 anggota, hanya 2 di antaranya adalah perempuan, atau hanya 3,08%. Hal ini menyoroti bahwa bahkan dalam budaya yang tidak menganut patriarki, laki-laki masih mendominasi secara signifikan di sektor publik, khususnya dalam ranah pemerintahan.

Gambar 1.1

Daftar Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sumatera Barat (2019-2024)

DAERAH PEMILIHAN I (Kota Padang)		DAERAH PEMILIHAN II (Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat)		DAERAH PEMILIHAN III (Kab. Bukittinggi, Kab. Kerinci)		DAERAH PEMILIHAN IV (Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat)	
1	DESRIO PUTRA, ST (GERINDRA)	1	FIRDAUS, S.H.I (PKB)	1	ISMUNANDI SOFYAN, SE (GERINDRA)	1	DONIZAR (PKB)
2	H. HIDAYAT, S.S., M.H (GERINDRA)	2	TRI SURYADI, S.E (GERINDRA)	2	LAZUARDI ERMAN, S.H. (GOLKAR)	2	HJ. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd (GERINDRA)
3	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN (GERINDRA)	3	JEMPOL (GERINDRA)	3	H. RINALDI, SP. DI. RAJO MANGKUTO (PKS)	3	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK (GERINDRA)
4	ALBERT HENDRA LUKMAN (PDI-PERJUANGAN)	4	Dra. Hj. SITIZATI AZIZ (GOLKAR)	4	H. RAFDINAL, SH (PKS)	4	SYAMSUL BAHRI (PDI-PERJUANGAN)
5	H. AFRIZAL, S.H. M.H. (GOLKAR)	5	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP (PKS)	5	H. M. SYAFRIL HUDA (PPP)	5	H. BENNY UTAMA, S.H., M.M. (GOLKAR)
6	H. GUSTAMI HIDAYAT (PKS)	6	MUHAMMAD IKHBAL, SE (PAN)	6	ANDRI WARMAN, S. Sos., M.M (PAN)	6	M. IHPAN (PKS)
7	H. RAHMAT SALEH (PKS)	7	H. M. NURNAS, ST (DEMOKRAT)	7	H. ISMET AMZIS, SH (DEMOKRAT)	7	SAWAL, SH (PPP)
8	H. INDRAT RAJO LELO, SH.MM (PAN)			8	H. NOFRIZON, S.Sos (DEMOKRAT)	8	H. MUZLI M. NUR, S.Pd (PAN)
9	H. MAIGUS NASIR, S.Pd (PAN)					9	SABAR AS, S.Ag (DEMOKRAT)
10	H. SUWIRPEN SUB, S.Sos (DEMOKRAT)						

(Sumber : KPU Sumatera Barat)

Bali, sebagai salah satu daerah di Indonesia, dikenal dengan keteguhan dalam menjalankan tradisi dan budayanya. Di samping dominasi patriarki, Bali juga menonjolkan sistem patrilineal yang kokoh. Dalam kerangka sistem patrilineal, laki-laki menjadi pusat keputusan, mengharuskan perempuan untuk mengikuti

⁷ Radjab, M. (1969). Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Padang: Center for Minangkabau Studies.

arahan mereka⁸. Kepercayaan pada "purusa" atau garis keturunan laki-laki, semakin mendukung dominasi patriarki dalam masyarakat yang membuat posisi perempuan semakin dipinggirkan. Meskipun semua perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama, budaya setempat, seperti di Bali, membatasi kebebasan mereka. Dominasi patriarki di Bali menyebabkan perempuan sering hanya menjadi pelaksana keputusan yang diambil oleh laki-laki⁹.

Hal serupa terjadi pada perempuan di Bali, di mana budaya patriarki nampaknya menetapkan bahwa perempuan umumnya terbatas pada peran domestik dan keterlibatan dalam ritual.¹⁰ Pria di Bali menikmati posisi dan peran yang istimewa. Ini termanifestasi dalam proses pengambilan keputusan signifikan di masyarakat, di mana hanya laki-laki yang memiliki hak untuk menentukan, sementara perempuan hanya menerima keputusan yang telah dibuat oleh laki-laki. Stereotip budaya yang tercipta ini menyiratkan bahwa perempuan memiliki tingkat pendidikan, melek huruf, dan pengetahuan yang lebih rendah, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran sipil dan politik. Budaya patriarki juga

⁸ Umniyyah, Z. (2020). *Marginalisasi Perempuan : Cara Pandang Masyarakat Penganut Sistem Patriarki Dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini*. 1(1), 120–129. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/issue/view/1031>

⁹ Darmayoga, I. K. A. (2021). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi, Keagamaan Di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan)*. 1(2).

¹⁰ Silaban, R. G., Mahyuni, I. A. P., & Sidemen, I. A. W. (2009). *Perempuan Bali dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 dan 2019)*. <https://doi.org/10.24843/JH.20>

mempengaruhi kondisi psikologis perempuan yang mendambakan posisi kepemimpinan. Budaya ini melemahkan rasa percaya diri dan ketegasan perempuan untuk terjun dalam posisi kepemimpinan. Terakhir, sifat kompetitif dari proses politik itu sendiri sering dipandang sebagai permainan yang tidak menguntungkan (zero-sum game). Hal ini dapat membatasi dukungan publik terhadap partisipasi perempuan dalam jabatan publik¹¹.

Berdasarkan keterangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) mengenai partisipasi politik perempuan dan laki-laki, disampaikan bahwa hasil survei World Bank menunjukkan bahwa jika terdapat keseimbangan partisipasi yang aktif antara perempuan dan laki-laki dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, maka mungkin tercipta kebijakan yang lebih representatif dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mendukung upaya mencapai pembangunan yang lebih baik. Budaya patriarki perlu dihapuskan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam ranah politik. Ini karena pada prinsipnya, semua individu berhak mendapatkan peluang dan posisi dalam konteks politik tanpa ada batasan bahwa hanya kaum laki-laki yang berhak mendapat legitimasi untuk itu. Diperlukan upaya untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam politik agar mereka dapat mengaplikasikan kemampuan mereka di arena politik. Hal ini bertujuan agar

¹¹ Mukarom, Z. (2022). *Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament*. 23(1). <https://vc.bridgew.edu/jiws>

terwujud kesetaraan gender dalam sistem demokrasi, yang mengedepankan prinsip demokrasi berbasis kesetaraan gender atau *gender democracy*.

Di Indonesia, telah disahkan Undang-Undang yang menangani Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958. UU tersebut mengatur tentang pencapaian kesetaraan dan non-diskriminasi, menjamin hak memilih dan dipilih, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, peluang untuk menduduki posisi jabatan di birokrasi, dan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Dasar hukum yang kokoh juga terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (2), yang menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus demi mencapai kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan dalam UU dan UUD tersebut menjadi landasan kuat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan memiliki kesempatan yang setara di segala aspek kehidupan dan politik.

Jika dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Dan juga di dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa :

“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Namun, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum pada pemilu tahun 2019, terlihat bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 20,8 persen, dengan jumlah 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa amanat yang terkandung dalam UU tersebut belum sepenuhnya terpenuhi..

Meskipun pada saat ini, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih dianggap rendah. Contohnya, terlihat pada partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Pada tahun 2019, anggota DPRD Provinsi Bali berjumlah 55, dengan 46 anggota laki-laki dan 8 anggota perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan belum mencapai setidaknya 30%, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹².

Sebagai contoh, dalam Pilukada 2014, terdapat 41 calon anggota DPD RI yang bersaing untuk 4 kursi, dengan hanya 2 calon perempuan, menyumbang

¹² Mukarom, Z. (2022). *Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament*. 23(1). <https://vc.bridgew.edu/jiws>

sekitar 4,9 persen dari total. Partisipasi calon legislatif perempuan dari Bali pada tingkat nasional pada saat itu masih mencapai tingkat yang sangat rendah, yakni sekitar 7,5 persen. Selain itu, dalam Pemilukada 2014, dari sekian banyak calon yang bersaing, hanya satu perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Denpasar, yaitu Putu Metta dari Partai Golkar (2014-2019) dan Sari Galung dari Partai PDI Perjuangan pada periode 2009-2014. Data yang dikumpulkan oleh LSM Bali Sruti menunjukkan bahwa jumlah perempuan Bali yang terpilih sebagai anggota DPR RI tidak lebih dari 10%.

Tabel 1.1

**Data Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Tahun 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin**

Partai Politik	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
PDI Perjuangan	20	2	22
Golkar	7	1	8
Demokrat	4	0	4
Gerindra	4	0	4
Hanura	2	0	2
PSI	1	1	2
Nasdem	3	0	3
Jumlah	44	4	48

(diolah dari <https://satudata.denpasarkota.go.id/dataset/>)

Tabel 1.2**Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – BALI**

Dapil	Total Kursi	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan
Bali 1	8	PDIP	4	1
		Golkar	1	0
		PSI	0	1
		Demokrat	0	1
Bali 2	6	Gerindra	1	0
		PDIP	4	0
		Golkar	1	0
Bali 3	6	Gerindra	1	0
		PDIP	4	0
		Golkar	1	0
Bali 4	4	Gerindra	1	0
		PDIP	1	1
		Golkar	1	0
Bali 5	12	Gerindra	1	0
		PDIP	6	0
		Golkar	2	0
		Nasdem	1	0
		Hanura	1	0
		Demokrat	1	0

Bali 6	3	PDIP	2	0
		Golkar	1	0
Bali 7	7	Gerindra	1	0
		PDIP	2	1
		Golkar	0	1
		NasDem	1	0
		Demokrat	1	0
Bali 8	3	Gerindra	1	0
		PDIP	1	1
Bali 9	6	PDIP	4	1
		Demokrat	1	0
TOTAL			47	8

(diolah dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-bali>)

Situasi serupa terjadi pada Pemilu 2019 di Bali, dengan banyaknya nama calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi Bali dari berbagai partai. Sebagai contoh, Partai PKB memiliki 2 calon perempuan, Partai Gerindra dengan 20 calon perempuan, Partai PDI Perjuangan dengan 20 calon perempuan, Partai Golkar dengan 20 calon perempuan, Partai Nasdem dengan 19 calon perempuan, Partai Garuda dengan 8 calon perempuan, Partai Berkarya dengan 12 calon perempuan, PKS dengan 4 calon perempuan, Partai Perindo dengan 21 calon perempuan, PPP dengan 10 calon perempuan, PSI dengan 17 calon perempuan, PAN dengan 6 calon perempuan, Partai Hanura dengan 22 calon

perempuan, Partai Demokrat dengan 21 calon perempuan, PBB dengan 1 calon perempuan, dan PKPI dengan 3 calon perempuan.

Dalam konteks politik, representasi perempuan merujuk pada jumlah dan proporsi perempuan yang terlibat dalam posisi kekuasaan politik, seperti anggota parlemen, pemimpin partai politik, dan pejabat pemerintahan. Persentase perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen, misalnya, menunjukkan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Representasi politik perempuan penting karena memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan kualitas institusi politik¹³. Beberapa alasan mengapa representasi politik perempuan penting adalah sebagai berikut:

Mewakili kepentingan perempuan: Perempuan memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda dalam kehidupan dan masyarakat. Dengan adanya representasi politik perempuan yang cukup, kepentingan perempuan dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, seperti kebijakan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan kesetaraan gender.

Peningkatan kualitas kebijakan: Studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dapat meningkatkan

¹³ Hessami, Z., & da Fonseca, M. L. (2020). Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. *European Journal of Political Economy*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>

kualitas kebijakan. Perempuan cenderung membawa perspektif yang berbeda dan pengalaman hidup yang unik ke dalam diskusi kebijakan. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan .

Mendorong partisipasi politik perempuan: Representasi politik perempuan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam politik. Ketika perempuan melihat perempuan lain yang berhasil dalam politik, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk ikut serta dalam proses politik. Ini dapat membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan secara keseluruhan.

Mewujudkan kesetaraan gender: Representasi politik perempuan merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender. Dengan adanya perempuan yang terlibat dalam posisi kekuasaan politik, stereotip dan diskriminasi gender dapat diatasi. Ini dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif.

Inspirasi bagi generasi muda: Representasi wanita yang lebih tinggi dalam politik dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Wanita politisi yang sukses dapat menjadi contoh teladan bagi perempuan muda dan mendorong partisipasi politik perempuan di masa depan.

Peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik: Representasi wanita yang lebih tinggi dalam politik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik

terhadap lembaga politik. Kehadiran wanita dalam posisi kekuasaan politik dapat mencerminkan keberagaman¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan politik perempuan di Bali terbilang minim dan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana budaya patriarki juga berdampak pada hal tersebut. Berbagai penelitian terdahulu sudah banyak yang menyadari minimnya representasi perempuan di Bali dan daerah lainnya , kemudian mengkaji faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan menggunakan teori patriarki, partisipasi politik, keterwakilan politik, sertai teori gender dan politik , untuk mendalami dampak dari budaya patriarki terhadap keterwakilan perempuan di Bali dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Penelitian ini akan membuktikan adanya dampak tersebut dengan harapan selanjutnya dapat memberikan data yang bisa membantu mengatasi masalah minimnya keterwakilan perempuan di pemerintahan Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang mengenai keadaan politik perempuan saat ini dan budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Bali, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁴ Satris, R., & Sabilla, K. R. (2021). Influence of women political participation in parliament correlates to gender issues in Indonesia. *Sociologia y Tecnociencia*, 11(EXTRA 1), 177–187. https://doi.org/10.24197/st.Extra_1.2021.177-187

1. Bagaimana budaya patriarki berdampak pada minimnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Bali tahun 2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak budaya patriarki pada minimnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Bali 2019.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis, tokoh politik, bahkan masyarakat sipil tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Sesuai dengan konsep kesetaraan gender yang diangkat dan pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pemerintahan khususnya negara demokrasi. Dan memberikan penjelasan lanjutan tentang besarnya pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan perempuan , utamanya dalam kehidupan politik perempuan di Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai dampak budaya patriarki pada keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi

Bali tahun 2019 ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Menjadi koreksi penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sehingga bisa mewujudkan kesetaraan gender dalam hak politik masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan menjadi satu hal untuk dievaluasi sehingga kedepannya bisa terlibat atau memberikan partisipasi aktif dalam politik di Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penulisan ini, penulis akan membaginya ke dalam 6 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan alur berpikir berupa latar belakang mengenai demokrasi yang identic dengan partisipasi politik dan hubungannya dengan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Penulis juga menjelaskan bagaimana status quo terkini mengenai keterwakilan perempuan dalam Pileg DPRD Provinsi Bali dari masa ke masa yang memberikan penggambaran mengenai perkembangan atau ketimpangan yang ada. Kemudian menjelaskan konsep kesetaraan gender yang tidak terwujud karena berkembangnya konsep patriarki dalam kehidupan masyarakat Bali yang berimbas pada berbagai aspek salah satunya partisipasi politik.

Selain itu , bab ini juga memuat rumusan masalah yang akan dianalisis dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mendefinisikan teori dan konsep yang relevan dan dipakai dalam analisis. Penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang serumpun dengan pembahasan tulisan ini. Yang kemudian berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, penulis juga menjabarkan istilah-istilah atau kata kunci yang banyak dibahas dalam penelitian guna memberikan batasan dan pemahaman yang lebih jelas.

BAB III : METODE PENULISAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan metode penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Memuat prosedur, pendekaran, metode pengumpulan data, hingga hal detail mengenai lokasi, narasumber, jadwal, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menyajikan deskripsi data tentang gambaran umum masyarakat Bali dan gambaran keterwakilan politik perempuan di Bali, beserta data-data penunjang yang relevan.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membagi pembahasan dalam beberapa sub-bab untuk menguraikan hasil analisis pengaruh budaya patriarki pada keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi

Bali tahun 2019. Penulis menjelaskan hasil wawancara dan menjelaskan data yang sudah didapatkan dan diolah.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memaparkan rangkuman keseluruhan dari penelitian yang sudah dilakukan, mulai dari latar belakang masalah hingga hasil pembahasan dan memberikan kesimpulan atas analisis. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang berupa pandangan dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

